



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN  
UNIT PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN  
PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh dan berkesinambungan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana di lapangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
7. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya adalah unsur pelaksana operasional Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu di lapangan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemeliharaan Infrastruktur Cipta Karya.

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan adalah kegiatan perawatan prasarana di bidang permukiman dan perumahan, gedung, dan penyehatan lingkungan agar tetap laik fungsi dan dalam kondisi baik.
14. Pemeliharaan jalan adalah usaha mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.
15. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, menjaga terhadap pengaruh yang merusak, serta upaya untuk menghindari kerusakan komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah kerja seluruh kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang permukiman dan perumahan, gedung, dan penyehatan lingkungan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaana melaksanakan fungsi:

- a. pemeliharaan prasarana jalan lingkungan pada kondisi baik dan sedang;
- b. pemeliharaan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum pemeliharaan 30% (tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan/atau maksimum 2% (dua persen) dari harga standar per meter persegi tertinggi;
- c. pemeliharaan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan;
- d. penyelenggaran pelayanan administrasif;
- e. penyusunan data kondisi prasarana yang ada.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya terdiri dari:
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Kepala Unit

Pasal 7

- (1) Kepala Unit adalah unsur pimpinan pada Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemeliharaan infrastruktur keciptakaryaannya sesuai dengan fungsinya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan dan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit melaksanakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya;
  - b. pemeliharaan prasarana jalan lingkungan pada kondisi baik dan sedang;
  - c. pemeliharaan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum pemeliharaan 30% (tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan/atau

- c. pemeliharaan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum pemeliharaan 30% (tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan/atau maksimum 2% (dua persen) dari harga standar per meter persegi tertinggi;
- d. pemeliharaan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan;
- e. pekerjaan darurat jalan lingkungan, gedung dan Keciptakarya;
- f. pembinaan administrasi dan personil Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya secara periodik;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit dalam memberikan pelayanan administratif.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;
- c. pengelolaan urusan keuangan Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kearsipan Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;



- e. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang tertentu yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya serta mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Tenaga Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Unit dalam melaksanakan sebagian tugas pokok unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional di bidang pekerjaan umum dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan jumlah pemegang jabatan fungsional, ditetapkan sesuai kebutuhan, beban kerja dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan organisasi.

### Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI KAPUAS HULU,



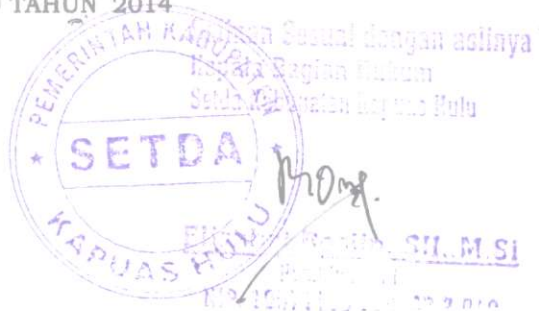
Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 19 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. MUHAMMAD SUKRI

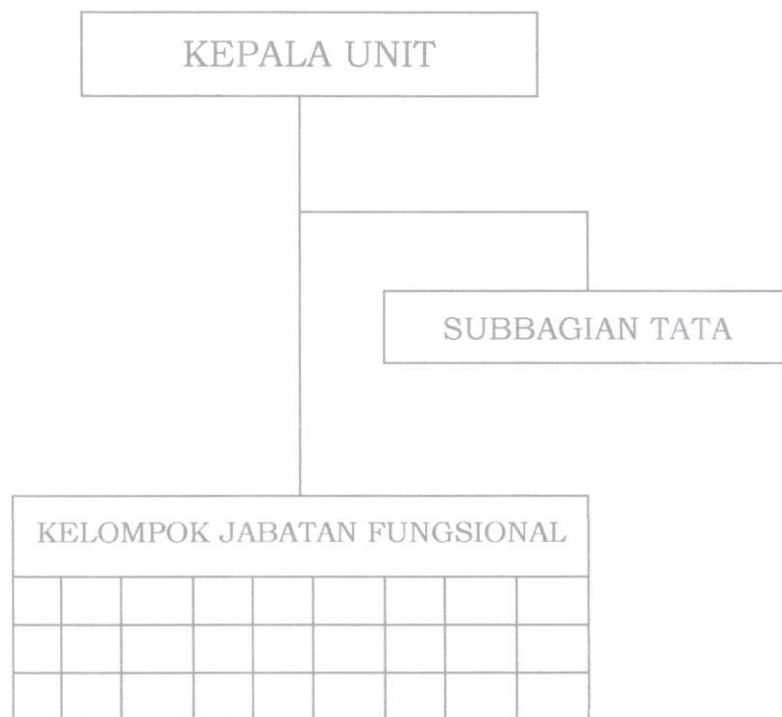
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014  
NOMOR 29



SI M. SI  
19 Agustus 2014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 29 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR  
KECIPTAKARYAAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR